

MODERNISASI PARTAI POLITIK DI ERA 4.0

Arsyi¹

¹Universitas Almuslim Bireuen, Aceh

¹Contributor Email: amyusut103@gmail.com

Abstract

In a democracy, the presence of political parties is very much needed. Political parties act as the backbone for the journey of democracy in Indonesia, because political parties play a role in the political process in the legislative body, government, and other related institutions. The existence of political parties is increasingly important for channeling collective will - presenting the interests of various groups in society that are held in general elections. Modernization of political parties refers to the process of development and evolution from lower levels to higher levels. Modernization has the meaning of transformation which means a change in the existing system in a country caused by the progress of globalization that involves changes in politics, social structure, culture and economic growth. Modernization of political parties is the dynamics of political modernization which implies a process of increasing complexity of human problems that require political action. In general, it can be said that politics is a matter that includes the differentiation of roles as well as integrating the organizational structure. The modernity of the role and organizational structure of politics implies the existence of political parties that act as a link between the public and the government. Community Participation in the 4.0 era also provides opportunities for increased political participation in campaigning on social media, where campaigns carried out through social media have different values from traditional campaigns. Modernization of political parties provides opportunities and obstacles that can facilitate the realization of a democratic government system. Modernization of political parties can increase public participation in transparently viewing the proposed political party but unlimited information can also be one of the problems that will destabilize unity due to hate speech among political parties or communities of political parties aimed at related political opponents.

Keywords: *Modernization, Political parties, Participation, Social media*

A. Pendahuluan

Dewasa ini, pembicaraan mengenai partai politik adalah sebuah prolematika yang sedang menjadi trending di tengah masyarakat apalagi detik-detik menjelang pemilu 2024 nanti. Bicara mengenai partai politik, maka secara tidak sengaja kita telah mengawasi masa depan politik Indonesia. Sebagai pondasi demokrasi, partai politik memiliki kedudukan yang strategis dalam mengawasi dinamika demokrasi kearah yang

lebih substansial. Bahkan kehadiran partai politik dapat mewujudkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi arah pembangunan Indonesia yang akan datang.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menyampaikan, bahwa lembaga KPU telah resmi membuka pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Sesuai dengan aturan KPU (PKPU) Nomor 3 dan 4 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu. Tercatat ada Sembilan parpol yang sudah menyerahkan dokumen pendaftaran partai calon peserta pemilu 2024. Kesembilan partai tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Keadilan Persatuan (PKP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Reformasi, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Perindo, NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Daulat Indonesia (Pandai). Berangkat hal ini, perlu peninjau kembali apakah modernisasi politik dalam konteks parpol sudah mulai berlangsung atau belum. Hal ini mengingat bahwa pentingnya kita merujuk apabila melihat pada kondisi politik Indonesia saat ini, dimana semakin banyaknya geliat partai baru yang ikut mewarnai isu perpolitikan nasional.

Merujuk pada situasi dan kondisi yang ada, maka ada dua solusi yang diketengahkan, Pertama; ialah merevitalisasi format demokrasi dengan merumuskan strategi untuk memperbaiki kelembagaan pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat dengan mereformasi sistem pemilu agar lebih partisipatif, kondusif, efektif dan efisien. Kedua, revitalisasi demokrasi akan menuntun pada upaya untuk memodernisasi partai politik. Sistem pemilu yang lebih ramah dan menerapkan rekrutmen yang lebih berbasis pada pengalaman, kompetensi dan komitmen anggota.

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sekaligus memperjuangkan kepentingan umum, maka dibutuhkannya sebuah tindakan untuk melakukan modernisasi. Modernisasi ialah memilih tujuan untuk pembangunan partai politik yang luwes dan kokoh untuk memenuhi tuntutan-tuntutan terhadap aspirasi publik yang diajukan. Pembangunan partai politik yang luwes membutuhkan perubahan-perubahan yang signifikan, khususnya pada badan partai politik itu sendiri.

Dalam negara demokrasi kehadiran partai politik sangatlah dibutuhkan. Partai politik berperan sebagai tulang punggung bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, karena partai politik berperan dalam proses politik dilembaga legislatif, pemerintahan, dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Keberadaan partai politik semakin menjadi penting untuk menyalurkan *Collective will* mempresentasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang diselenggarakan dalam pemilihan umum.

Perkembangan teknologi pun turut memberikan dampak yang besar terhadap proses demokrasi politik. Seperti penggunaan media sosial untuk saat ini menjadi lahan politik yang sangat mudah dijangkau oleh siapa pun dan semua kalangan. Era 4.0 memudahkan setiap kegiatan masyarakat seperti halnya memberikan kemudahan bagi partai politik untuk menyebarluaskan program-program kerjanya, dan meningkatkan elektabilitas dan popularitas partai politik. Media sosial telah memberikan ruang baru dalam lingkungan studi demokrasi atau disebut dengan demokrasi digital yang berarti memanfaatkan teknologi komunikasi digital untuk menyebarkanluaskan informasi terkait partai politik dan memajukan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.

Berdasarkan hasil ulasan di ataslah yang menjadi daya tarik untuk membahas topik ini lebih dalam tentang bagaimana modernisasi partai politik di era 4.0 menuju era 5.0. Hal ini berangkat dari tinjauan fenomena bahwa perkembangan teknologi turut menjadi salah satu indikator yang membantu berkembangnya cara partai politik dalam mewujudkan pemerintahan yang berdemokrasi, dimana media sosial adalah area yang menyediakan informasi secara transparan dan tidak terbatas. Masyarakat akan lebih cepat menemukan dan merespon informasi politik yang mereka butuhkan, sehingga secara tidak langsung media sosial memberikan ruang kepada masyarakat untuk berdiskusi politik secara online. Media sosial telah menjadi tren yang banyak dipilih partai politik dan kandidat yang diusungnya untuk memperkenalkan dirinya di tengah masyarakat.

B. Metode

Bagian Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode dokumentasi dan studi pustaka melalui studi jurnal-jurnal dan buku-buku, hasil dari temuan tersebut digunakan untuk dianalisis mengenai keterkaitan Modernisasi Partai Politik Di Era 4.0

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian modernisasi partai politik

Modernisasi partai politik mengacu pada proses perkembangan dan evolusi dari tingkat yang lebih rendah menuju tingkat atas. Modernisasi memiliki makna transformasi yang berarti ialah perubahan sistem yang ada di sebuah negara yang disebabkan oleh proses kemajuan globalisasi yang melibatkan perubahan pada politik, struktur sosial, budaya dan pertumbuhan ekonomi. Modernisasi erat kaitannya dengan pembangunan politik karena modernisasi membicarakan mengenai perubahan secara keseluruhan yang membawa konsekuensi terhadap aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, pendidikan dan lain sebagainya.

Sedang partai politik sendiri memiliki makna bahwa partai politik ialah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa, dan memungkinkan pendukungnya untuk mendapatkan keuntungan dengan dukungannya tersebut. Hal yang menjadi tujuan utama dari partai politik ialah mendapatkan kekuasaan dan melakukan kontrol terhadap orang-orang yang duduk dalam pemerintahan sekaligus mengontrol mereka dan mengontrol kebijakan publik yang dihasilkan. Dalam konteks ini partai politik adalah entitas mandiri dari pemerintah agar bisa mengkritisi kebijakan yang ada.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa modernisasi partai politik ialah dinamika modernisasi politik yang mengisyaratkan suatu proses meningkatnya kompleksitas masalah-masalah manusia yang memerlukan tindakan politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa politik menjadi urusan yang melingkupi diferensiasi peran sekaligus mengintegrasikan struktur organisasional. Modernitas peran dan struktur organisasional politik mengisyaratkan keberadaan partai-partai politik yang bertindak sebagai mata rantai yang menghubungkan publik dan pemerintah.

Menurut Samuel Huntington, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat menyatakan bahwa modernisasi politik terdiri dari tiga elemen dasar, yaitu rasionalisasi otoritas wewenang, diferensiasi struktur dan perluasan partisipasi politik.

Huntington juga berpendapat bahwa karakteristik pembangunan politik identik dengan modernisasi sehingga dapat dimaknai sebagai modernisasi politik. Ada empat kriteria dalam mengukur perkembangan politik yaitu;

- 1) Rasionalisasi, yaitu melibatkan pergerakan dari partikularisme ke universalisme.
- 2) Nasionalisme dan Integrasi nasional, yaitu kriteria yang mengacu kepada pembangunan bangsa sebagai aspek kunci dari pembangunan politik.
- 3) Demokratis, yaitu memfokuskan pada persaingan dan pemerataan kekuasaan.
- 4) Mobilisasi, yaitu menitikberatkan pada partisipasi politik karena semakin besar pembangunan politik, modernisasi dan mobilisasi maka akan semakin besar partisipasi politiknya

Sebagai pilar penyangga demokrasi, partai politik memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga siklus demokrasi yang strategis substansial. Bahkan, peran partai politik ikut mendorong masyarakat dalam menentukan arah pembangunan Indonesia dimasa mendatang. Richard Marelmen mengatakan bahwa dari semua alat yang pernah di desain oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya, barangkali tidak ada yang lebih ampuh dari partai politik. Hal ini mendorong modernisasi partai politik merupakan sebuah keniscayaan peradaban, agar lekas sampai pada esensi pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Jika ditinjau lebih dalam modernisasi partai politik turut memberikan dampak yang merupakan hasil respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap perkembangan modernisasi partai politik seperti turut membantu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat sehingga hal ini dapat mempengaruhi terjadinya pembaharuan pada cara berfikir masyarakat yang irasional menjadi rasional. Hal ini terkait bahwa segala informasi mengenai partai politik dapat diakses oleh masyarakat luas sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menilai perkembangan politik. Selain mempermudah akses keterlibatan publik, teknologi informasi mampu menyampaikan platform perjuangan partai kesemua lapisan masyarakat. Ekstensifikasi gerakan politik ke ranah popularitas ke ranah publik dimedia sosial memegang peranan penting untuk mempengaruhi kecenderungan masyarakat.

Modernisasi politik juga dapat memperkuat kesatuan dan persatuan di masyarakat karena karakteristik masyarakat modernisasi akan cenderung bersikap terbuka, menerima atau memberikan saran dalam segala bentuk perubahan. Dengan hal ini masyarakat akan saling berdiskusi sehingga mendorong hubungan yang kuat untuk menuju kearah persatuan dan kesatuan di masyarakat yang demokrasi yang berarti memiliki kebebasan dalam bersuara.

Partai politik memiliki peran tersendiri dalam sistem pemerintahan demokrasi. Partai menyokong masyarakat untuk ikut terlibat secara padu dalam sistem pemerintahan yang mendukung terpilihnya sejumlah pejabat publik. Partai politik akan menciptakan partisipasi aktif dalam politik, menuntut politik bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan mendorong debat dan diskusi tentang isu-isu penting.

Dapat diasumsikan bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai politik, pernyataan ini bukan lagi hal yang asing diperdengarkan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa institusi partai politik adalah salah satu pilar yang memiliki nilai yang penting untuk melakukan pembangunan sistem demokrasi selain institusi pemilu, eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga pers yang bebas. Meskipun kedudukan partai politik memiliki peran penting dalam demokrasi, tetapi tanpa partai politik yang tidak kuat maka tidak mudah terciptanya demokrasi yang kuat pula.

2. Partisipasi masyarakat pada era 4.0 dalam pemilu

Pemilu yang berintegrasi sangat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat yang aktif. Menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin partisipasi politik ialah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, masih atau poradis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Conyer mengatakan bahwa ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat itu penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk meraih informasi terkait kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Kedua, Masyarakat akan lebih mempercayai setiap adanya proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Ketiga, timbul anggapan

bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan merupakan sebuah langkah awal untuk mewujudkan sikap demokrasi antara partai politik dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat pada era 4.0 dalam juga memberikan peluang meningkatnya partisipasi politik dalam berkampanye di media sosial, dimana kampanye yang dilakukan melalui media sosial memiliki nilai yang beda dengan kampanye yang dilakukan secara tradisional. Partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yang dapat dikembangkan di sosial media. Pertama; Partisipasi kebijakan, yaitu partisipasi tentang tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, media sosial memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendukung dan menentang kebijakan yang diambil pemerintah. Kedua; Partisipasi politik, yaitu partisipasi yang mempengaruhi terciptanya kerjasama antara partai politik dan masyarakat dalam membuat perencanaan program. Ketiga; Partisipasi sosial, yaitu partisipasi yang bertujuan meningkatkan modal sosial seperti solidaritas atau petisi publik. Dengan begitu kehadiran media sosial memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya untuk membentuk solidaritas dalam menanggapi problematika terkait kepentingan publik.

Fenomena kekuatan media sosial dapat diamati dari pemilu 2019. Kedua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yaitu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi sama-sama membentuk solidaritas untuk mendukungnya di media sosial. Hal yang menjadi segmen yang menarik perhatian dalam kampanye dan sosialisasidimedia sosial adalah komunitas. Melalui komunitas dapat terbentuknya korelasi yang kuat karena adanya kesamaan ketertarikan dan value yang dimiliki. Menyakinkan komunitas dengan menggunakan media sosial sebagai trik yang strategis dalam kampanye dan sosilisasi, secara otomatis akan mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari komunitas tersebut. Karena setiap pesan yang tersampaikan di ruang publik akan memberikan efek berantai yang semakin luas.

3. Peluang dan tantangan modernisasi partai politik di era 4.0

Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak yang besar terhadap proses demokrasi politik. Polarisasi politik melalui media sosial sangat dirasakan semenjak bergulirnya pesta demokrasi pada tahun 2014 pada saat pemilihan Presiden Republik

Indonesia. Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia pada Pilpers 2014 menjawab bagaimana peran media sangat berpengaruh dalam menunjang popularitas.

Dalam era demokrasi, internet sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi, berperan merevolusi sistem, struktur dan proses demokrasi yang selama ini diterapkan, munculnya istilah demokrasi digital yang menggambarkan bagaimana kehidupan demokrasi berlangsung di dunia internet. Penggunaan media sosial saat ini menjadi lahan politik yang sangat mudah diakses oleh setiap lapisan masyarakat mulai dari pemerintah dalam menyebarluaskan program kerjanya.

Perhatian masyarakat terutama di media sosial menjadi lebih peka terkait setiap informasi yang disebarluaskan. Hal ini mengingat bahwa partai politik merupakan instrumen penting dalam demokrasi. Adatiga alasan mengapa partai politik penting dalam berdemokrasi; Pertama, partai politik di ibaratkan kendaraan utama bagi perwakilan politik. Kedua; partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintah dan Ketiga; partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi. Maka dengan adanya partai politik diharapkan aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan.

Kekuatan media sosial mempengaruhi masyarakat didasarkan secara eksklusif pada aspek sosialnya. Hal ini berarti perkembangan modernisasi partai politik pada era 4.0 memberikan peluang melakukan kampanye untuk meningkatkan popularitas partai politik. Dalam konteks kampanye, popularitas ialah faktor penting untuk maju dalam kontestasi pemilu. Popularitas menciptakan pemahaman pemilih untuk dapat melihat kepantasan dari seorang calon/kandidat yang kemudian akan memberikan dampak terhadap mengikatnya nilai elektabilitas partai politik.

Ignatius Haryanto mengatakan bahwa perkembangan media sosial yang terkait dengan partai politik membentuk tiga dasar motif fungsi yaitu: Pertama, sebagai cara untuk melakukan perluasan menarik suara dan dukungan untuk mereka yang belum menetapkan pilihannya. Kedua, menggunakan media sosial sebagai media yang membantah opini atau informasi yang tidak benar yang ditujukan kepada partai politik atau menggunakan media sosial sebagai media untuk menyerang pihak lawan. Ketiga, sebagai bagian kegiatan ekonomi yang bisa bertumpang tindih dengan motif lainnya. Hal inilah yang menjadikan media sosial semakin masif digunakan oleh partai politik, relawan serta elemen-elemen

lainnya yang berpartisipasi. Informasi disajikan baik dalam bentuk teks, kreativitas gambar dan audio-video.

Namun meskipun begitu, modernisasi partai politik yang melibatkan masyarakat secara luas justru cenderung akan menciptakan masalah atau gejala sosial dalam menilai sisi partai politik atau pemerintahan. Hal ini terjadi karena akses ruang publik yang tidak terkendali memunculkan propaganda terhadap partai politik yang tidak menjadi pilihannya, seperti melakukan penyebaran hoax dan menjatuhkan citra partai politik. Meningkatnya pola konsumtif informasi dimasyarakat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat untuk membedakan mana yang benar dan tidak.

Modernisasi partai politik era 4.0 juga memberikan tantangan yang juga sangat berpengaruh terhadap berjalannya persatuan dan kesatuan. Pengendalian penggunaan media sosial dalam berpolitik yang tidak terkendali justru menjadi sebuah boomerang yang menyebabkan terjadi perpecahan dan perselisihan. Penyebaran informasi berita yang palsu akan mendorong terbentuknya perpecahan, pengelompokan dan radikalisme. Fenomena ini merupakan peperangan politik di era modern saat ini. Konsumsi berita atau framing media yang dapat memanipulasi informasi yang akan mempengaruhi para pemilih yang juga merupakan pengguna media sosial.

Fenomena yang dapat dilihat bagaimana informasi yang mengandung unsur kebencian dapat memicu disintegrasi Bangsa. Ujaran kebencian tentang partai politik menyebar luas dengan cepat di era digital. Ujaran kebencian tentang partai politik ini dapat mengeksploitasi isu politik identitas, memercik sentiment moralitas agama, dan nasionalisme yang dilakukan oleh partai politik yang mereka dukung dengan tujuan menjatuhkan lawan yang dianggap tidak memiliki pendapat yang sama, sehingga hal ini secara tidak langsung dapat memicu melemahnya ketahanan dan persatuan nasional karena perpecahan.

Fenomena kebebasan memberikan pendapat yang terjadi di sosial media sering juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kontroversi yang menciptakan keraguan di tengah masyarakat. Isu sorotan pengguna media sosial ialah isu yang terkait dengan isu sentimen Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dan isu independensi lembaga survei. Kedua isu ini akan menjadi isu yang mainstream di media,

yang terus disebarluaskan hingga menjadi perbincangan yang menjadi topik utama dimedia-media mainstream.

Fenomena ini dapat dilihat dari masih maraknya kampanye golput yang dinarasikan di media sosial. Gerakan kampanye golput masih begitu masif di tengah masyarakat seperti yang dilakukan oleh Lini Zurlia yang mengampanyekan untuk tidak memilih kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota legislatif di media sosial. Ajakan untuk melakukan golput ini dilakukan setelah ia melihat Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin yang dianggapnya memiliki rekam jejak intoleran. Di sisi lain, Prabowo di anggap bukan pilihan karena jejaknya di kasus pelanggaran HAM.

Pada era digital, secara umum semua pasangan capres dan cawapres atau calon legislatif pasti akan diterpa isu negatif. Isu-isu negatif yang berkembang dimedia sosial tidak bersifat parsial, tapi memiliki keterkaitan dengan media mainstream. Media sosial akan semakin masif dipergunakan politis, relawan, dan elemen lainnya untuk memenuhi pertarungan politik, bahkan mampu menciptakan berita hoax tertentu untuk menjatuhkan lawan dalam politik. Maka, hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik atau kandidat, relawan dalam pemilu ialah mereka harus bisa beradaptasi dengan era baru ini, bertransformasi adalah keharusan, jika tidak akan tergilas oleh era baru pengelolaan secara digital.

D. Penutup

Dalam era reformasi ini, partai politik menjadi salah satu institusi yang memiliki peran yang sangat penting. Partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi perkembangan demokrasi. Modernisasi partai politik ialah dinamika modernisasi politik yang mengisyaratkan suatu proses meningkatnya kompleksitas masalah-masalah manusia yang memerlukan tindakan politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa politik menjadi urusan yang melingkupi diferensiasi peran sekaligus mengintegrasikan struktur organisasional.

Modernitas peran dan struktur organisasional politik mengisyaratkan keberadaan partai-partai politik yang bertindak sebagai matarantai yang menghubungkan publik dan pemerintah. Partisipasi masyarakat pada era 4.0 juga memberikan peluang meningkatnya partisipasi politik dalam berkampanye di media sosial, dimana kampanye yang dilakukan melalui media sosial memiliki nilai yang beda dengan kampanye yang dilakukan secara tradisional. Namun partai politik di era 4.0 tidak terlepas dari tantangan bagi partai politik atau kandidat, relawan dalam pemilu ialah mereka harus bisa beradaptasi dengan era baru ini, bertransformasi adalah keharusan, jika tidak akan tergilas oleh era baru pengelolaan secara digital.

Referensi:

- Antonio Pradjasto. 2007. *"Partai Poltik tak Hanya Kemampuan memerintah"*, Jurnal Jentera
- Akhmad Danial. 2009. *"Iklan Politik Modernisasi Kampanye Politik Paca OrdeBaru"*, Yogyakarta: LKIS
- Ani Rachaman, *"Cakupan Modernisasi di Berbagai Bidang dan Dampaknya"*, Kompas.com, 15 Oktober 2022
- Andrian Sopa. *"Lembaga Survei: Jumlah Golput di Pilpers 2019 Paling Rendah 2004"*, <https://www.bbc.com> 15 Oktober 2022
- Chlisin. 2007. *"Dasar-dasar Ilmu Politik"*. UNY Press: Yogyakarta
- Daud M. Liando, *"Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon WakilPresiden di Kabupaten Minahasa, 2014)"* Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 3, No. 2, 15 Oktober 2022
- FayakhunAndriadi, *"Demokrasi di Tangan Netizen serta Tantangan & Prospek Demokrasi Digital"*, RMBOOKS: Jakarta Selatan, 2016)
- Firman Noor, *Weber dalam Economie at Societe*, 2018
- Ignatius Haryanto, *"Media Sosial dan Demokrasi Harapan atau Ancaman?"* <http://mediaindonesia>, 16 Oktober 2022
- Nasrul Faiz, *"Geliat Parpol di Tengah Modernisasi Politik Jelang Pemilu 2024"*, liputan6.com, 13 Oktober 2022
- Netherlands *"Institute for Multiparty Democracy"* (NIMD), Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis (Jakarta, 2006) hlm.10
- Putri, *"Popularitas Selebriti Sebagai Alat Kosmetika Politik"*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2018 Vol. 3, No. 1.
- Sandi Allifiansyah. 2016. *"Kaum Muda, Meme dan Demokrasi Digital diIndonesia"*. Yogyakarta: Jurnal Ilmu Komunikasi UGM

Syamsyudin Haris. 2014. *"Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi"* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia).

Surbakri. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, (Gramedia Widisaran Indonesia: JakartaTim Editor, *"Fenomena Politik Kebencian Memicu Disintegarsi Bangsa"*[Http://kumparan.com](http://kumparan.com) 15 Oktober 2022.